

**KALIMANTAN DALAM MASA REVOLUSI INDONESIA
(TARIK-ULUR ANTARA UNITARISME DAN FEDERALISME)**

1945-1950

oleh

Prof. Helius Sjamsuddin, Ph.D., MA

Dr. Hj. Enok Maryani, MS

1. Pengantar

Ada suatu masa dalam Revolusi Indonesia antara 1945-1950, mengedepan isu atau wacana sentral (yang kemudian menjadi sumber konflik) antara unitarisme *versus* (*vs*) federalisme, antara bentuk negara kesatuan *vs* bentuk negara federal (serikat), antara golongan unitaris republiken *vs* golongan federalis (yang dituduh) oportunis, antara gerakan yang setia mempertahankan negara kesatuan *vs* pembela negara-negara bagian. Secara metafora dikatakan, antara mereka yang ingin integrasi *vs* “disintegrasi”, antara kekuatan sentripetal kontra sentrifugal. Republik Indonesia (RI) merepresentasikan negara kesatuan, unitarisme, republiken, kekuatan sentripetal integratif, sedangkan negara-negara bagian dan “daerah-daerah di luar Republik Indonesia” bentukan Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook merepresentasikan kekuatan federalisme, negara serikat, negara-negara bagian yang “disintegratif.”

Di kalangan republiken sendiri muncul dua golongan besar. Pertama, yang ingin membela dan mempertahankan kemerdekaan hasil proklamasi dengan kekuatan bersenjata untuk melawan kolonialisme yang ingin kembali sesudah berakhirnya Perang Dunia II (Perang Pasifik); dan kedua, golongan yang tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalan diplomasi dengan mengangkat isu “masalah Indonesia” ke dunia internasional (internasionalisasi).

Begitu juga di pihak federalis, ada dua kelompok. Pertama, golongan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara federal sambil tetap mempertahankan sandaran pada pemerintah kolonial Belanda; dan golongan kedua, yang ingin Indonesia sebagai sebuah negara federal, tetapi bersama-sama dengan negara-negara bagian yang sudah terbentuk, “daerah-daerah di luar kekuasaan Republik Indonesia,” dan Republik Indonesia hasil proklamasi, membentuk sebuah Negara (kemudian Republik) Indonesia Serikat (NIS, kemudian RIS) yang merdeka, berdaulat, demokratis yang lepas sama

sekali dari kedaulatan pemerintah kolonial Belanda. Kalau pun toh ada hubungan dengan Belanda, hubungan itu di dalam rangka masing-masing sederajat, setara dan masing-masing berdaulat dan merdeka.

Penelitian ini memilih Kalimantan (pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang disebut “Borneo”) sebagai fokus kajian dalam kerangka Revolusi Indonesia. Kalimantan seperti juga daerah “Timur Besar” (dikenal sebagai *Groote Oost*, Indonesia bagian timur), semasa pendudukan Jepang diduduki pemerintah angkatan laut Jepang, sedangkan Sumatra dan Jawa diduduki angkatan daratnya. Sesudah Perang Dunia II (Perang Pasifik) berakhir, jika Sumatra dan Jawa mula-mula diduduki Sekutu (Inggris), kemudian menyusul Belanda, di Kalimantan (juga Timur Besar) diduduki tentara Sekutu (Australia) bersama-sama dengan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) dan tentara KNILnya (dan KL).

Perbedaan-perbedaan tentara pendudukan ini menyebabkan perjalanan sejarah masing-masing berbeda, masing-masing melalui suatu proses yang cukup kompleks. Jika Jawa-Madura dan Sumatra dianggap sebagai pusat kegiatan-kegiatan revolusi (*core*) setelah Proklamasi, maka Kalimantan dan Timur Besar meskipun setelah Proklamasi dinyatakan sebagai bagian-bagian dari *delapan* propinsi awal Indonesia tetapi berada di “pinggiran” (*periphery*) revolusi, karena langsung dan/atau tidak langsung dengan bantuan tentara Sekutu (Australia) *segera* diduduki Belanda.

Di Kalimantan sebagai sebuah kasus menarik dalam revolusi Indonesia ini, terjadi suatu pergulatan antara pihak-pihak yang ingin Kalimantan sebagai salah sebuah negara bagian federal *versus* pihak-pihak yang menginginkan Kalimantan tetap sebagai bagian dari Republik Indonesia hasil Proklamasi. Untuk itu mereka melakukan perjuangan bersenjata meskipun harus mengorbankan jiwa-raga mereka melawan Belanda yang praktis masih menduduki pulau itu.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan sejarah pasang-surut pergulatan itu: antara kekuatan federalis yang “disintegratif” melawan kekuatan unitaris yang integratif. Dalam kerangka makro, Republik Indonesia sendiri setelah mengalami “penciutan,” wilayah-wilayahnya terpaksa dengan cara-cara diplomasi yang meletihkan dan menimbulkan “pro-kontra internal,” mengakomodasi dua kekuatan tersebut dalam perjanjian Linggajati (1947) dan perjanjian *Renville* (1948). Sesudah “mundur” dengan

menerima federasi dalam bentuk “Negara Indonesia Serikat” (sebelum menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS”), pada tahun 1949 sesudah menjadi RIS yang berusia relatif singkat akhirnya pada tahun 1950 kembali menjadi negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, Republik Indonesia. Kalimantan termasuk di dalamnya.

2. Unitarisme vs federalisme

Seperti sudah disinggung di atas, dalam sejarah Indonesia antara periode 1945-1950, salah satu isu penting yang mengemuka ialah antara yang memihak bentuk negara kesatuan di satu pihak, dan negara federal di lain pihak. Sehubungan dengan itu, sebelum kita memasuki sejarah politiknya sendiri, kita melihat lebih dahulu kedua konsep ini baik secara wacana maupun dalam kenyataan empirisnya.

Secara konseptual-teoritis, sebuah negara kesatuan adalah sebuah negara yang tiga organ negara utama [eksekutif, legislatif, dan yudikatif] diperintah secara konstitusional sebagai sebuah unit tunggal, dengan salah satunya secara konstitusional diciptakan melalui perundang-undangan. Kekuasaan politik dari pemerintah dari negara-negara semacam itu dapat ditransfer ke level-level yang lebih rendah (*lower level*), ke nasional, regional atau majelis-majelis lokal yang dipilih, gubernur-gubernur dan walikota-walikota (pemerintah yang sudah maju, *developed government*), tetapi pemerintah pusat tetap memegang hak utama dapat *recall* (menggantikan) kekuasaan yang didelegasikan. (http://en.wikipedia.org/wiki/Unitary_state).

Dalam tataran historis-empiris Indonesia, para pendiri bangsa sebagai wakil-wakil rakyat Indonesia dari berbagai pulau yang duduk dalam BPUPK (*Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*) membahas bentuk-bentuk negara yang dicita-citakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin selaku salah seorang anggota BPUPKI, misalnya, menulis dalam pidatonya tentang penolakannya terhadap beberapa paham kenegaraan seperti: ”federalisme (persekutuan), feodalisme (susunan lama), *monarchie* (kepala negara berturunan), liberalisme, autokrasi dan birokrasi, dan demokrasi Barat.” Menurutnya, ”Negara Republik Indonesia” yang akan didirikan adalah ”suatu negara kebangsaan (*etat national*) yang merdeka dan berdaulat penuh.” (Yamin, 1959: 99) Begitu pula Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di forum yang sama (kelak dikenal dengan pidato hari lahirnya Pancasila)

menegaskan kembali bahwa akan didirikan sebuah "Negara Kebangsaan Indonesia (*nationale staat*)" (Yamin, 1959: 69). Selanjutnya Soekarno dalam sidang pleno BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 selaku ketua Panitia Kecil¹ telah mengelompokkan usul-usul yang masuk—dari sembilan kelompok—satu di antaranya tentang isu "unificatie dan federatie" (Yamin, 1959: 147; cf. *Risalah BPUPKI & PPKI*, 1995: 8)

Ketika para pendiri republik merumuskan bentuk dan wilayah negara republik Indonesia yang akan berdiri kelak, maka setelah melalui pembahasan panjang pada tanggal 10 Juli 1945 para peserta sidang sepakat bahwa bentuk negara adalah *republik* (Vide *Risalah Sidang BPUPKI & PPKI*, 1995: 126-127) dan menganut faham unitarisme (*unitaristisch*) bukan federalisme (*federalistisch*) (*Risalah Sidang BPUPKI & PPKI*, 1995 : 28; 109; 122). Juga ada ada wacana seperti yang diajukan oleh anggota BPUPKI Dr. Soekiman tentang hubungan negara-negara yang disebut "statenbond" (perserikatan negara-negara), lalu *bondstaat* (negara serikat) dan akhirnya "eenheidsstaat" (negara kesatuan). Dalam negara kesatuan (*eenheidsstaat*) "menjamin satu urusan, satu bentuk yang *se-efficient-efficientnya*." (*Risalah Sidang BPUPKI & PPKI*, 1995: 122-123). Kemudian dalam Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ketika membahas pengesahan Undang-undang Dasar Bab I tentang bentuk negara, maka semuanya sepakat bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik." (*Risalah Sidang BPUPKI & PPKI*, 1995: 429). Jadi di luar bentuk itu, apakah kerajaan, atau bentuk-bentuk lain yang menganut faham federalisme dianggap melanggar undang-undang dasar, dan kekuatan-kekuatan lain yang menyimpang dari ketentuan tersebut dianggap sebagai kekuatan sentrifugal yang distintegratif, sebagai lawan dari kekuatan-kekuatan sentripetal yang integratif. Dengan kata lain bentuk negara kesatuan (unitarisme) ada pilihan, sedangkan bentuk negara federal (federalisme) adalah lawan.

Jadi setiap usaha untuk merubah menjadi negara federal berarti "menghianati" cita-cita proklamasi. Ini yang menjadi pegangan utama para pemuda dan TNI untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan dalam suatu wadah republik kesatuan Indonesia. Friksi antara para diplomat (termasuk politisi) Indonesia dengan tentara berpangkal pada ini. Para diplomat/politisi lebih fleksibel: prinsip asal Indonesia bisa

¹ Panitia Kecil terdiri dari Ketua: Ir. Soekarno, anggota-anggota: Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kiai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutardjo, Maramis, Oto Iskandardinata, dan Drs. Mohammad Hatta.

merdeka dan berdaulat, sekali pun "mundur" (sementara) menjadi negara berbentuk federasi seperti NIS atau RIS, mereka masih dapat menerimanya. Jadi metafora gerak bandul, "kekuatan sentripetal" (*centripetal forces*) yang menghendaki negara kesatuan (unitaris) *versus* "kekuatan sentrifugal" yang menghendaki bentuk federasi (federalis), merupakan karakteristik dari sejarah Indonesia, khususnya pengalaman Kalimantan antara 1945-1950.

Pada gilirannya, secara konseptual-politis, federalisme semula adalah sebuah filsafat politik di mana sebuah *kelompok (group)* anggota-anggotanya diikat bersama (*bound together*) di bawah sebuah kepala perwakilan pemerintahan (*a governing representative head*). Istilah *federalisme* dapat juga untuk menggambarkan sebuah sistem pemerintahan di mana kedaulatan secara konstitusional dibagi antara sebuah otoritas sentral dan unit-unit politik peserta (*constituent political units*, seperti negara-negara bagian atau propinsi). Federalisme adalah sebuah sistem di mana kekuasaan untuk memerintah dibagi bersama (*shared*) di antara pemerintah nasional (*the national*) dan pemerintah-pemerintah negara-negara bagian (*state government*), menciptakan apa yang acapkali disebut federasi (*federation*). Para pesertanya (*proponents*) acapkali disebut federalis-federalis (*federalists*). ( <http://en.wikipedia.org/wiki/Federalism>)

Tampaknya pengertian federal atau federalisme tampaknya cair (*fluid*), karena setiap orang bisa berbeda penafsiran tentang realisasi konsep ini. Pengalaman dalam sejarah Indonesia menunjukkan bagaimana konsep ini tidak digunakan dengan konsisten, antara lain seperti yang terjadi di Kalimantan.

Pemerintah kolonial Belanda (dalam hal ini melalui Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook) karena sudah menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi kembali memerintah jajahannya seperti semula sebelum Perang Dunia II, menggunakan strategi dan taktik lain. Jika tokh Indonesia merdeka, susunan ketatanegaraan harus dibuat sedemikian rupa sehingga kepentingan-kepentingan kolonial mereka masih terwakili. Belanda menginginkan Indonesia dibentuk dalam struktur ketatanegaraan berdasarkan federasi di mana pengaruh Belanda di Jawa menjadi sangat kecil sedangkan di luar Jawa yang biasa disebut daerah-daerah seberang (*Buiten Gewesten*) sangat kuat (Anak Agung Gde Agung, 1995: 44). Oleh sebab itu van Mook berhasil membentuk "negara-negara" Pasundan, Jawa Timur, dan Madura untuk "mengepung" Republik Indonesia yang

berpusat di Yogyakarta. Di luar Jawa ia membentuk Negara Indonesia Timur untuk daerah-daerah yang pada jaman kolonial disebut ”*Groote Oost*” (Timur Besar, yang termasuk pulau-pulau Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku (termasuk Papua). Mengenai Borneo (Kalimantan) sudah ada pembahasan tentang ”Negara Borneo” (Negara Kalimantan) sebagai salah satu negara bagian dari Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk selain Negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia. Untuk itu van Mook menyiapkan lebih dahulu daerah-daerah otonom dalam bentuk dewan-dewan seperti Dewan Kalimantan Barat, Dewan Kalimantan Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, dan Dewan Banjar. (Vide *Staatsblad van Nederlandsch Indië*, 1946-1948).

3. Proklamasi dan pembentukan propinsi Kalimantan

Ketika proklamasi kemerdekaan diucapkan tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Republik Indonesia yang disepakati oleh PPKI (*Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*) meliputi bekas wilayah kolonial Hindia-Belanda sebelum Perang Dunia II. Wilayah itu pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan secara administratif dibagi atas *delapan propinsi* dengan gubernurnya masing-masing:

1. Jawa Barat (Gubernur: Sutardjo Kartohadikusumo)
2. Jawa Tengah (Gubernur: R. Pandji Suroso)
3. Jawa Timur (plus Madura) (Gubernur: R.A. Soerjo)
4. Sumatra (Gubernur: Mr. Teuku Mohammad Hassan)
5. Celebes [Sulawesi] (Gubernur: Dr. G.S.S.J. Ratulangie)
6. Sunda Kecil (*Kleine Sunda Eilanden*) (Gubernur: Mr. I Gusti Ktut Pudja)
7. Maluku (termasuk Papua) (Gubernur: Mr. J. Latuharhary)
8. Borneo [Kalimantan] (Gubernur: Ir. Pangeran Mohammad Noor)

(*Risalah Sidang BPUPK & PPKI*, 1995: 30; 510)

Khusus untuk gubernur Borneo diangkat Ir. Pangeran Mohammad Noor.² Sebelumnya tahun 1945 ia diangkat sebagai anggota BPUPKI mewakili Kalimantan. (*Risalah Sidang BPUPK & PPKI*, 1995: 601).

² Lahir di Martapura (Kalimantan Selatan), tanggal 24 Juli 1901. (Lihat *Risalah Sidang BPUPK & PPKI*, 1995: 601)

Terdorong oleh rasa tanggung jawab, Gubernur M. Noor berusaha untuk berangkat ke Banjarmasin menempati posnya. Bersama staf dan sejumlah ± 120 orang pemuda Kalimantan, akhir Oktober 1945 Gubernur bekerjasama dengan *Badan Pembantoe Oesaha Goebornoer Republik Indonesia Daerah Borneo*³ (BPOG) merencanakan berangkat dari Surabaya dengan menggunakan kapal *Merdeka*. Rombongan ini juga mendapat bantuan dari Radio Surabaya berupa dua pemancar radio dan anggota-anggota Palang Merah seperti Tjilik Riwut, Abdurrachman dan A. Barmawi Thaib (ketiga-tiganya adalah putra-putra Kalimantan). Akan tetapi rombongan itu gagal berangkat. Kapal mereka tertembak Sekutu (NICA) karena dalam waktu yang hampir bersamaan Surabaya terperangkap dalam pertempuran 10 November 1945 yang terkenal itu. (Nila Suseno, 1996: 5-6; Hassan Basry, 2003: 59)

Berita tentang kapan persisnya rakyat Kalimantan mendengar berita tentang Proklamasi masih simpang-siur. Salah satu sumber menyebutkan bahwa berita tentang Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 tidak segera terdengar hari itu juga di Kalimantan. Baru setiba dua orang Kalimantan sendiri dari Jawa di Banjarmasin yaitu A.A. Hamidhan⁴ dan A.A. Rivai tanggal 24 Agustus mereka mendengar apa yang telah terjadi. Ditambah pula sesudah berita *Borneo Shimbun* di Banjarmasin dan Kandangan menyiarkan berita Proklamasi itu, termasuk juga Undang-undang Dasar negara dan pengangkatan Ir. Pangeran Mohammad Noor selaku Gubernur Kalimantan (Hassan Basry, 2003:9; 12), rakyat Kalimantan sadar bahwa telah terjadi perubahan politik yang mendasar di Indonesia.

Sebagai salah seorang pemimpin yang dipercaya oleh tokoh-tokoh Kalimantan yang berada di Jawa, Hamidhan mendapat tugas:

Pertama, mendirikan Komite Nasional Indonesia daerah Kalimantan.

Kedua, mendirikan Partai Nasional Indonesia.

Ketiga, mendirikan Badan Keamanan Rakyat. (Hassan Basry, 2003:9)

³ Istilah “Borneo” dan “Kalimantan” masih sering dipertukarkan. *Kop* surat Gubernur yang diterbitkan di Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 1946 masih menggunakan: “Pemerintah Republik Indonesia, Goebornoer Borneo.” Lihat Nila Suseno, 1996: 102; 104-109.

⁴ Anang Abdul Hamidhan, tahun 1945 menjadi anggota PPKI. Ia juga menghadiri penyusunan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Putra Kalimantan ini, lahir tanggal 25 Februari 1909, di Rantau (Kalimantan Selatan).

Di kemudian hari Hassan Basry dalam bukunya *Kisah Gerilya Kalimantan* (2003) mengeritik Hamdidhan karena tidak satupun dari ketiga tugas itu dilaksanakannya karena ia "menghilang" kembali ke pulau Jawa. (Hassan Basry, 2003:9).

Apapun yang akan terjadi sesudah Proklamasi itu, sebuah *caesura* sejarah telah terjadi: masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang telah berakhir dan sebuah Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu telah dinyatakan berdiri. Sebagian rakyat Kalimantan menyambut gembira dan merasa sudah menjadi bagian dari Republik itu meskipun di pihak lain sebagian dari elit-elit tradisional yang pernah menjadi pegawai-pegawai Belanda sebelum perang menyambut kemerdekaan itu dengan sikap skeptis sambil menunggu dengan harap akan kedatangan kembali Belanda.

Tetapi kenyataan tidak semudah apa yang rakyat Kalimantan dengar tentang kemerdekaan itu. Suatu perkembangan yang tidak mereka harapkan terjadi bulan-bulan berikut yang membuat sejarah Kalimantan berbeda dengan apa yang terjadi di Jawa.

4. Pembentukan "negara-negara bagian."

Belanda berniat mendirikan "negara" kecil-kecil dengan orang-orang yang dapat dijadikan boneka sebagai kepala negaranya. (Nasution, 1978, 5,: 398). Sementara itu karena gagal menyelesaikan masalah politik Indonesia dengan pemerintah Republik Indonesia, van Mook mulai mendekati para pemuka politik dan tokoh masyarakat di luar Jawa, mula-mula dengan pejabat pemerintahan di Indonesia bagian timur untuk membantu menyelenggarakan sebuah muktamar besar. Agendanya membahas ketatanegaraan baru dan susunan pemerintahannya. Menurut rencana pertemuan itu tanggal 16 Juli 1946. Pertemuan itu akan mengikutsertakan wakil-wakil dari Borneo karena Belanda merasa bahwa di wilayah itu mereka telah menguasai politik dan keamanannya. Juga akan diundang wakil-wakil daerah di seluruh wilayah Timur Besar, Bangka, Riau, dan Belitung. Kelak muktamar itu dikenal dengan Konperensi Malino. (Gde Agung, 1985: 95-97)

Hanya Republik Indonesia yang tidak diundang. Semua wakil daerah diundang dan hadir terutama dari Kalimantan Barat: Sultan Hamid, Oevang Oeray, Tok Hiang Soen, Lauw (penasehat); Kalimantan Selatan: Abdoel Asikin Noer, R. Cyrillus. Haji Abdoel Samad, Ibas bin Oega; Kalimantan Timur: A.R. Afloes, Datoe Mohamad,

Sampan alias Zainuddin, Raden Soeroto (penasehat); dari Bangka/Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sangihe/Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua, Tanimbar, Kepulauan Kei dan Aru, Kepulauan Barat Daya, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor. (Gde Agung, 1985: 100-102; 1983: 167)

Dalam pidato pembukaannya di Malino, van Mook mengajak daerah-daerah di luar Jawa dan Madura untuk membentuk ketatanegaraan dan ketertiban hukum baru bersama dengan pemerintah Belanda. Menurutnya ada dua pilihan: sistem negara kesatuan dan sistem federal. Negara kesatuan memang murah dan tidak menuntut tenaga pimpinan yang banyak seperti negara berbentuk federasi. Akan tetapi negara kesatuan mengandung bahaya bahwa satu bagian yang dominan akan menguasai keseluruhannya. Oleh sebab itu dalam negara kesatuan ada ancaman perpecahan. Tetapi dalam negara yang berbentuk federasi ancaman perpecahan semacam itu dapat dihindari karena setiap negara bagian dapat mengurus dirinya sendiri tanpa ada dominasi dari kelompok dominan tertentu. Itu sebabnya pemerintah Belanda tidak dapat menerima sistem negara kesatuan melainkan sistem negara federal. (Gde Agung, 1983: 167-168)

Konferensi Malino memutuskan pembentukan suatu federasi yang wilayahnya akan meliputi Hindia-Belanda sebelum perang dunia. Negara itu disebut Negara Indonesia Serikat yang terdiri atas Jawa, Sumatra, Timur Besar dan Borneo. Di dalam negara-negara bagian itu akan dilaksanakan desentralisasi pemerintahan dalam wujud daerah otonomi sesuai dengan keinginan masing-masing etnis. Konferensi itu juga menyarankan pemasukan Sunda Kecil di dalam wilayah Timur Besar dan swapraja Kalimantan Timur dimasukkan ke dalam negara Borneo yang akan dibentuk. (Gde Agung, 1985:113-114)

Gagasannya di Konferensi Malino tentang untung-ruginya negara kesatuan (unitarisme) dibandingkan dengan federalisme dilanjutkan kembali oleh van Mook dalam Konferensi Denpasar yang diselenggarakan antara tanggal 18 Desember-24 Desember 1945. Seperti di Malino, di Denpasar ia mengunggulkan negara federal. Memang sejak 21 Desember 1945, federasi sudah menjadi pokok pendirian pemerintah Belanda juga. Sehubungan dengan itu maka pada akhir konferensi Denpasar itu dibentuklah apa yang disebut Negara Indonesia Timur (NIT). Wilayahnya apa yang termasuk "*Groote Oost*"

(Timur Besar) pada jaman pemerintah kolonial Belanda sebelum Perang Dunia II. (Gde Agung, 1985: 114; 122-179)

Setelah terbentuk Negara Indonesia Timur (24 Desember 1946) (terdiri dari Celebes, Maluku, Sunda Kecil), maka menyusul pembentukan negara-negara bagian lain oleh van Mook seperti: "Negara Pasundan" (Pasundan I), tanggal 4 Mei 1947 (Soeria Kartalegawa); "Negara Madura," 23 Januari 1948 (Wali Negara R.A.A. Tjakraningrat); "Negara Jawa Barat" (Pasundan II), 26 April 1948 (Wali Negara R.A.A. Wiranatakusumah) karena "Negara Pasundaan" dari Soeria Kartalegawa tidak berfungsi; "Negara Sumatera Timur," tanggal 24 Maret 1948 (Wali Negara Dr. Tengku Mansyur); "Negara Jawa Timur," 26 November 1948 (Wali Negara R.T.P. Achmad Kusumonegoro); Negara Sumatra Selatan, 30 Agustus 1948 ; Negara Jawa Tengah, 2 Maret 1949) (*30 tahun Indonesia Merdeka*, 1981: 140; Gde Agung, 1983: 170; Sjamsuddin, 1992)

Jika Belanda berhasil membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) di Timur Besar dan menyusul negara-negara bagian lain-lain sebagai "model" federasi, Belanda juga merencanakan membentuk "Negara Borneo" tetapi belum (tidak) sempat berhasil kecuali dalam bentuk "dewan-dewan" sebagai embrio "Negara Borneo" yaitu Daerah Istimewa Borneo (Kalimantan) Barat, Borneo (Kalimantan) Timur, Borneo (Kalimantan) Selatan, Borneo (Kalimantan) Tenggara, dan Borneo (Kalimantan) "Barat Daya" (Kotawaringin), dan Dayak Besar (Kalimantan Tengah).

5. Kiprah BFO

Dr. Van Mook selaku wakil tertinggi pemerintah Hindia Belanda di Batavia (Jakarta) antara tanggal 3-5 Januari 1948 menyelenggarakan konperensi di Batavia. Hadir selain Perdana Menteri Belanda Dr. L.J.M. Beel dan Menteri Urusan Daerah Seberang (dahulu disebut Menteri Jajahan), juga undangan wakil-wakil dari negara-negara bagian dan "daerah-daerah di luar kekuasaan RI." Maka hadir wakil-wakil seperti Negara Indonesia Timur (NIT), Sumatra Timur, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Bangka, Riau dan Belitung. Agenda yang dibicarakan tentang rencana pembentukan sebuah "pemerintah federal sementara" yang bertugas membantu van Mook dalam tugasnya sehari-hari sambil mempersiapkan

pembentukan negara federal, Negara Indonesia Serikat (NIS). Pendukung utama gagasan itu Sultan Hamid II, ketua Daerah Istimewa Borneo Barat dan dari Negara Sumatra Timur. Dari pihak NIT hadir Perdana Menterinya Ide Anak Gde Agung. (Gde Agung, 1985: 377-378). Dalam konperensi itu, sebagaimana yang ditulis Anak Agung Gde Agung dalam bukunya *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat* (1985), NIT menolak pembentukan "negara federal sementara" jika Republik Indonesia tidak disertakan. Setelah diskusi lama karena NIT ditentang oleh negara-negara bagian dan daerah-daerah lainnya, akhirnya dikeluarkan dua resolusi. Pertama setuju pembentukan "pemerintahan federal sementara," sementara resolusi kedua mengundang Republik Indonesia di Yogyakarta turut serta dalam pemebentukan pemerintah federal sementara. (Gde Agung, 1985: 378-379)

Tanpa ikut serta Republik Indonesia, atas desakan van Mook pemerintah federal sementara terbentuk juga bulan April 1948. Menurut Gde Agung, tidak ada suatu perubahan struktur dari pemerintah Hindia-Belanda, "bahkan sebenarnya suatu tipu muslihat Belanda belaka, di mana Pemerintah Hindia Belanda disulap dan diberi nama baru, yaitu Pemerintah Federal Sementara." (Gde Agung, 1985: 380).

Pada bulan Mei 1948, van Mook membuka sebuah konperensi di Bandung. Seperti biasa diundang wakil-wakil dari negara-negara bagian dan daerah-daerah di luar kekuasaan RI. Konperensi itu disebut Mukatamar Bandung yang diketuai oleh Perdana Menteri Negara Pasundan, Adil Poeradiredja, dan wakil ketua Sultan Pontianak Hamid II Alqaderi (Ketua Daerah Istimewa Borneo Barat). Yang dibahas masalah ketatanegaraan dan politik yang berhubungan dengan pembentukan NIS dan hubungan negara ini dengan kerajaan Belanda di kemudian hari. Maksud muktamar itu membentuk suatu konsepsi politik dalam pemecahan masalah Indonesia di mana van Mook menghendaki wakil-wakil negara bagian dan daerah-daerah di luar RI mendukung sikapnya menghadapi RI. (Gde Agung, 1985: 392; 402).

Sementara itu NIT dengan Perdana Menterinya Anak Agung Gde Agung memunculkan gagasan pembentukan sebuah *lembaga* sebagai wadah tempat berhimpun seluruh pemerintah negara-negara bagian dan daerah-daerah di luar kekuasaan RI. Tugasnya membahas pemecahan persoalan Indonesia secara keseluruhan. Lembaga ini akan berhadapan juga dengan pemerintah Belanda. Maka pada bulan Juli 1948, Anak

Agung Gde Agung dengan dukungan Perdana Menteri Adil Poeradiredja dari Negara Pasundan mengundang semua kepala pemerintahan negara-negara bagian dan wakil-wakil daerah di luar kekuasaan RI berkumpul di Bandung untuk membahas gagasan itu. Tanggal 8 Juli sudah berkumpul semua utusan seperti Negara Pasundan, NIT, Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Madura, Bangka, Belitung, Riau. Dari Kalimantan, hadir Dewan Banjar (A.H. Rivai, M. Rasjid), Dayak Besar (J. Dijk, B. Cyrillius Karsanega), Daerah Istimewa Borneo Barat (Sultan Hamid II, Mr. L. Tielenius Kruythoff), Kalimantan Tenggara (Drs. A. Cumala Noor, A.Zainal Abidin), Kalimantan Timur (A.R. Afloes, A.P. Sosronegoro). Sebagai peninjau wakil-wakil Jawa Tengah, Jawa Timur (kelak keduanya juga menjadi negara bagian) dan Padang. Demikianlah pada tanggal 15 Juli terbentuklah apa yang disebut *Bijeenkomst Federaal Overleg* (Pertemuan Musyawarah Federal) yang terkenal dengan singkatan BFO. Sebagai ketua diangkat Mr. T. Bahroen dari Negara Sumatra Timur (kelak ketua digantikan oleh Sultan Pontianak, Hamid II dan Anak Agung Gde Agung sebagai wakil ketua). Ketika itu BFO mengeluarkan resolusi tentang pembentukan "Pemerintah Federal Sementara" dengan niat mengikutsertakan Republik Indonesia di dalamnya. Tentu saja "Pemerintah Federal Sementara" versi BFO ini berbeda dengan "Pemerintah Federal Sementara" versi van Mook sehingga reaksi keras muncul dari pihaknya dan Belanda pada umumnya. Tetapi BFO telah bergulir. (Gde Agung, 1985: 402-414;) Bersamaan dengan itu juga resolusi Bandung yang dikeluarkan BFO isinya NIS (RIS) sedapat mungkin telah berdiri tanggal 1 Januari 1949, termasuk pemerintah *ad interim* (sementara) Federal (Pemerintah Federal Sementara) dengan sebuah direktorium sebagai pucuk pimpinan (*30 Indonesia Merdeka*, 1981:129-188).

Rupanya Anak Agung Gde Agung mempunyai pendapat lain tentang negara federal ini yang dianggapnya sebagai "kekuatan ketiga" (*third*, atau *synthetic forces*) seperti yang diperjuangkannya melalui BFO yang dibentuk di Bandung tanggal 15 Juli 1948. Bentuk federal yang dikehendakinya ialah Indonesia terdiri atas negara-negara bagian (federal) yang diikat dalam sebuah "Republik Indonesia Serikat" (RIS), termasuk Republik Indonesia hasil proklamasi di dalamnya (Leirissa, 2006). RIS ini adalah sebuah negara merdeka dan berdaulat, diperintah seluruhnya oleh bangsa Indonesia, bukan oleh Belanda seperti "model Uni Belanda-Indonesia" yang dicitakan oleh Belanda karena mereka masih berpengaruh di situ.

Peranan BFO sebagai kekuatan federal cukup signifikan sebagai pengimbang kekuatan unitarisme dari RI. Pada waktu penandatanganan Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta (14 Desember 1949) yang dihadiri oleh wakil-wakil Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan (termasuk distrik Federal Jakarta), Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur (termasuk daerah *status quo* Asahan Selatan dan Labuan Batu), Negara Sumatra Selatan, satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri: seperti Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, hadir juga wakil-wakil dari Borneo [Kalimantan] a.l. A.P. Sosronegoro. (*30 Indonesia Merdeka*, 1981: 177; 243-244) Dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus-2 November 1949) dan pada Penyerahan Kedaulatan 27 Desember 1949, BFO yang diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak selalu menyertai dan ikut serta menandatangani kesepakatan-kesepakatan bersama-sama Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi pemerintah Republik Indonesia. (*30 Indonesia Merdeka*, 1981:236-238; 251-252).

6. Kekuatan Sentripetal vs Kekuatan Sentrifugal

Dalam memorandumnya yang ditulis van Mook 20 Juli 1947 (sehari sebelum agresi militer Belanda I) terkesan bahwa Republik Indonesia tidak mematuhi perjanjian; angkatan bersenjata RI terus melakukan perlawanan; melakukan blokade terhadap penduduk Cina di Medan yang menyebabkan kelaparan; meskipun propinsi-propinsi Kalimantan, Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku telah "dibubarkan" menurut tuntutan perjanjian Linggajati, tetapi kegiatan perlawanan masih terus berlangsung; agitasi terjadi di Indonesia Timur dan Borneo. (Nasution, 5, 1978: 97; 306). Ini menunjukkan bahwa perlawanan-perlawanan untuk menyatu sebagai kekuatan sentripetal untuk setia pada Republik Indonesia hasil proklamasi berlangsung di mana-mana, tidak saja di Jawa dan Sumatra, juga di wilayah Negara Indonesia Timur, dan di Kalimantan sendiri yang oleh orang-orang Belanda masih tetap disebut "Borneo."

Sejak 18 November 1946 sudah berdiri Gerilya ALRI Divisi IV di Haryan (Kalimantan Selatan) dipimpin oleh Letnan Hassan Basry. Badan-badan perjuangan di Kalimantan berhasil dipersatukan meskipun melalui suatu proses yang cukup kompleks. Gerilya Divisi ALRI yang meliputi seluruh Kalimantan dibagi atas tiga daerah operasi:

1. Gerilya Divisi IV daerah A meliputi Kalimantan Selatan, berpusat di Hulu Sungai, dipimpin langsung oleh Hassan Basry sendiri.
2. Gerilya Divisi IV daerah B, meliputi Kalimantan Barat, berpusat di Pontianak, dipimpin Dr. Sudarso.
3. Gerilya Divisi IV daerah C, Kalimantan Timur, dipimpin R. Notosunardi, kemudian digantikan oleh Herman Runturambe dan Kasmani. (Nasution, 6, 1978 : 212-213).

Sementara itu atas inisiatif Gubernur Kalimantan M. Noor, KSAU Suryadarma, dan Mayor Tjilik Riwut dibentuk "Pasukan Payung RI Kalimantan" dipimpin Letda Iskandar. Latihan dilakukan seadanya di Maguwo tentang pendaratan dari udara, teori tanpa praktek. Semuanya putra Kalimantan. Berangkat tanggal 17 Oktober 1947 sejumlah 14 pemuda jam 1.30 dari Maguwo. Mayor Tjilik Riwut sendiri mengantar mereka di pesawat dalam penerjunan itu di daerah Kota Waringin. (Nasution, 6, 1978 :214-215). Meskipun pesawat kembali dengan selamat di pangkalan, dan para penerjun satu demi satu menjadi korban tentara NICA, peristiwa terjun payung itu sendiri baru pertama terjadi dalam sejarah perlawanan di Indonesia. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa heroik dalam perlawanan terhadap Belanda di Kalimantan. (Nasution, 1978, 6: 216; Nila Suseno, 2003: 9-68)

Gerilya Kalimantan Selatan terus giat melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Hassan Basry sebagai panglima bersama-sama para pemimpin perlawanan gerilya yang lain. (Nasution, 1978, 6: 210-211) Sementara itu di Kalimantan Tengah (Dayak Besar) Tjilik Riwut yang memang putra Dayak juga memimpin perlawanan gerilya. Kedua tokoh ini--Hassan Basry dan Tjilik Riwut--antara lain adalah tokoh-tokoh utama dalam memimpin perlawanan gerilya di Kalimantan. (Sjamsiar Seman, 1992: 23-50; Artum Arta, 1999: 3-22; Hassan Basry, 2003; Tjilik Riwut, 2007:169-224)

7. Penutup: Dari RIS ke NKRI

Secara kronologis terjadi berturut-turut peristiwa-peristiwa peralihan dari RIS kembali ke NKRI: Piagam Konstitusi RIS, 14 Desember 1949; pemilihan presiden RIS (Ir. Soekarno), 15 Desember 1949; 17 Desember 1949 Pelantikan presiden RIS; 27 Desember Mr. Asaat, ditunjuk selaku Pemangku Presiden RI; Pengakuan Kedaulatan

tanggal 27 Desember 1949; 28 Desember 1949 Presiden Soekarno kembali ke Jakarta. (*30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1981: 243-254)

Konstitusi RIS pasal 43 dan 44 memperkenankan penggabungan daerah yang satu ke daerah yang lain, negara bagian yang satu ke negara bagian yang lain asal sesuai dengan kehendak rakyat dari wilayah yang bersangkutan.

Dengan kesepakatan Parlemen (DPR) dan Senat RIS, pemerintah RIS mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Dengan Undang-undang Darurat itu negara-negara bagian satu demi satu bergabung dalam Republik Indonesia. Sampai tanggal 5 April 1950 hanya tinggal tiga negara bagian: Republik Indonesia (Proklamasi), Negara Sumatra Timur, dan negara bagian "tertua" dan "terbesar" yaitu Negara Indonesia Timur. (*30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1981: 42). Kalimantan yang sampai saat itu tidak pernah menjadi sebuah "Negara Borneo" kecuali terbatas pada wacana atau maksimal sebagai dewan-dewan yang duduk dalam BFO, dengan sendirinya sudah merupakan bagian dari Republik Indonesia. Dengan kata lain, dalam metafora gerak pendulum sentripetal *versus* sentrifugal, di Kalimantan kemenangan berada pada pihak unitaris.

Setelah melalui perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan kedua negara bagian lain dengan persetujuan Pemerintah RIS untuk membentuk negara kesatuan, maka pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai kesepakatan. Ketiga pihak menandatangani "Piagam Persetujuan." Dibentuk sebuah panitia bersama untuk menyusun suatu Rancangan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan. Tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mengesahkan Rancangan Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keesokan harinya tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Ir. Soekarno membacakan piagam pembentukan kembali negara kesatuan. (*30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1981: 42-43) Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai inti (*core*) dari negara kesatuan sejak awal, setelah melalui pengalaman "singkat" menjadi anggota dari sebuah negara berbentuk federasi, berhasil merangkul kembali semua wilayahnya dalam satu wujud negara kesatuan. Dengan sendirinya termasuk propinsi Kalimantan.

Bandung, 5 Oktober 2008

Daftar Pustaka

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI, Jakarta)

De Graaf, M.G.H.A. & Tempelaars, A.M. *Algemeen Secretarie van de Nederlands-Indië regering en de daarbij gedeponeerde archieven 1942-1950*, “6. Gouvernement Borneo [Pemerintahan Borneo]”

Perpustakaan Nasional (Jakarta)

Staatsblad van Nederlandsch-Indië. 1946. No. 17. *Borneo. Groot Oost*.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië. 1946. No. 134. *Binnenlandsch Bestuur. Borneo. Groot Oost*.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië. 1947. No. 3. *Bestuur. Borneo*.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië. 1948. No. 14. *Binnenlandsch Bestuur. Zuid Borneo. Daerah Bandjar*.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië. 1948. No. 58. *Commissie Generaal. Statut. West Borneo*.

Arsip yang telah diterbitkan (Perpustakaan Nasional, Jakarta)

Drooglever, P.J. & Schouten, M.J.B. (1988). *Officiële Bescheiden Betreffende de Nederlandsch-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*. Band 63.-'s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.; (1992) Band 71. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.; (1993) Band 75. 's-Gravenhage: Instituut voor Nederlands Geschiedenis; (1994), Band 77. 's-Gravenhage: Instituut voor Nederlands Geschiedenis

Buku

Achmad, Ya', *et al.* (1984). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*. Jakarta: Proyek IDSN, Depdikbud, Direktorat Sejarah & Nilai Tradisional.

Artha, Artum. (1999). *Hassan Basry. Bapak Gerilya Kalimantan. Pejuang Kemerdekaan*.

Basry, Hassan. (2003). *Kisah Gerilya Kalimantan*. 2 Jilid. Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua.

Ida Anak Agung Gde Agung, (1980). *'Renville' als Keerpunt in de Nederlands-Indonesische Onderhandelingen*. Alphen aan den Rijn: A.Q. Sijthoff's Uitgermaatschappij. Terjemahan *Renville*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. (1983).

_____. (1985). *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. (1995a). *Persetujuan Linggajati. Prolog dan Epilog*. Surakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press.

- _____. (1995b). *Pernyataan Rum-Roijen (Rum-Van Roijen Statement)*. Surakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press.
- Kahin, (1970) McTurnan George. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Itachaca and London: Cornell University Press.
- Leirissa, R.Z. (2006). *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sejarah.
- Nasution, A.H. (1978) *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. 11 Jilid. Bandung Penerbit Angkasa.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) & Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. (1995). Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Riwut, Tjilik. (1958). *Kalimantan Memanggil*. Jakarta: Penerbit Pustaka Endang.
- _____. (2007). *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: NR Publishing.
- _____. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang*. Pengayaan Adat Istiadat dan Budaya Suku Dayak, dari buku *Kalimantan Memanggil* dan *Kalimantan Membangun*. Dilengkapi Kumpulan Dokumen dan Catatan-catatan Tjilik Riwut. Yogyakarta: Penerbit Pusaka Lima.
- Seman, Syamsiar. (1992). *Hassan Basry Bapak Gerilya Kalimantan (Mengenang Langkah dan Perjuangannya)*. Bina Budaya Banjar. Banjarmasin.
- Sjamsuddin, Helius, *at al.*(1992). *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan*. Jakarta: Proyek IDSN.
- Sjamsuddin, Helius, (2005). “Perlawanan dan Perubahan. Kerajaan Sintang, 1822-1942.” Monografi Hasil Penelitian.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. ed. 2. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suseno, Nila [Putri Tjilik Riwut]. (1996). *Tjilik Riwut Berkisah. Sumpah Setia Masyarakat Dayak Pedlaman Kalimantan kepada Pemerintah Republik Indonesia*. Yogyakarta: Penebit Andi.
- _____. (2003). *Tjilik Riwut Berkisah. Aksi Kalimantan dalam Tugas Opreasional Militer Perta Pasukan Payung Angkatan Udara Republik Indonesia*. Berdasarkan catatan-catatan Tjilik Riwut, dilengkapi ungkapan tertulis para pelaku sejarah.

30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Sekretariat Negara RI. 1981.

Yamin, Muhammad. (1959). *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*. jilid I dan II. Djakarta: Yayasan Prapantja.